



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
ALIANSI PROFESI PENDIDIK EKONOMI INDONESIA
(ASPROPENDO)**



**TENTANG
AKTIVITAS PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (TRI DHARMA)**

Nomor: 16.7.5/UN32.4/KS/2026

Nomor: KS/VII-017.1/AS/VII/2026

Pada hari ini Kamis, 16 Juli 2026 bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

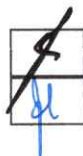
1. **Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M:** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Aniek Hindrayani, SE., M.Si.:** Ketua Umum Aliansi Profesi Pendidik Ekonomi (ASPROPENDO) bertindak untuk dan atas nama Aliansi Profesi Pendidik Ekonomi (ASPROPENDO) yang berkedudukan di Pratama Estate No. 6, Sewon, Bantul - Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Aliansi Profesi Pendidik Ekonomi yang bergerak dalam bidang pendidikan ekonomi yang berada di bawah naungan kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek);

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada kesepakatan bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- (2) Aliansi Profesi Pendidik Ekonomi (selanjutnya disingkat ASPROPENDO) adalah wadah profesional bagi dosen pendidikan Ekonomi yang berfungsi sebagai forum komunikasi, koordinasi, pengembangan kompetensi, serta peningkatan mutu pembelajaran mata pelajaran Ekonomi.
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program dalam perjanjian kerjasama secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerja Sama ini melibatkan 1) Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi dengan penanggung jawab **Roufah Inayati, S.Pd., M.Pd.**; 2) Program Studi S2 Pendidikan Ekonomi dengan penanggung jawab **Prof. Nasikh, S.E., M.P., M.Pd.**; 3) Program Studi S3 Pendidikan Ekonomi dengan penanggung jawab **Prof. Nasikh, S.E., M.P., M.Pd.**; 4) Aliansi Profesi Pendidik Ekonomi (ASPROPENDO) dengan penanggung jawab **Dr. Aniek Hindrayani, SE., M.Si.** meliputi kegiatan-kegiatan dalam Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bidang Pendidikan Ekonomi dan Ekonomi Pendidikan sesuai tujuan Aspropendo.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 3

TUJUAN

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Aliansi Profesi Pendidik Ekonomi (ASPROPENDO) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban menginformasikan kegiatan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan pelatihan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KESATU**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program pelatihan, dan pengabdian masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk masa 12 bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan dan disajikan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

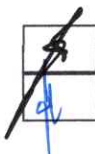
Nama : Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M
Jabatan : Dekan
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 552888
Surel : dekan.fe@um.ac.

PIHAK KEDUA

Aliansi Profesi Pendidik Ekonomi Indonesia (ASPROPENDO)

Nama : Dr. Aniek Hindrayani, SE., M.Si.
Jabatan : Ketua Umum ASPROPENDO
Alamat : Pratama Estate No. 6, Sewon, Bantul - Yogyakarta
Telepon : (0271) 648939
Surel : aspropendo@gmail.com

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 10

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11

PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU



Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA



Dr. Aniek Hindrayani, SE., M.Si.
Ketua Umum ASPROPENDO

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

